

# Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan: Strategi Pengelolaan Sampah Melalui Pendekatan Partisipatif

Oleh:  
*Ir. Ely Sufianti, MA*

## **Abstract**

*Up to now, the government efforts concerning the waste problem remain unsolved. To deal with, three parties involved, namely, government, society and private sector, should work simultaneously and support each other. What has been done by the local government by means of Environment Office or Local Corporate as the responsibility holder of local environment has not performed optimum results. On the other hand, the society and private sector as the biggest contributors of concrete waste are potential to be involved in solve this environmental problem. Thus, the waste management will be effective when initiated from its source.*

## **A. Pendahuluan**

Masalah lingkungan selalu menjadi sosok perhatian utama ketika telah sampai pada tahap kritis, ketika kerusakan telah sampai pada tahap yang sulit dikendalikan. Ketika suatu masalah muncul, media massa akan menyodori pembacanya dengan dengan permasalahan yang sama selama beberapa waktu, seolah tanpa upaya penyelesaian. Persoalan yang menimbulkan polemik berkepanjangan, terkadang hanya untuk mencari siapa yang salah, tanpa mendapatkan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.

Beberapa waktu lalu, pemda DKI Jakarta dipusingkan oleh masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA), akibat Pemda Bekasi akan menutup TPA Bantar Gebang yang selama ini dianggap telah mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Menurut seorang ahli, hal tersebut diakibatkan oleh penerapan sistem *sanitary landfill* yang tidak benar. Kota Bandung pun mempunyai masalah yang sama dengan meruahnya sampah yang tak dapat dikelola dan sampah yang dibuang warga di sungai yang melintas di tengah kota. Masalah lain diantaranya berkaitan dengan penataan kawasan Bopuncur, kawasan Bandung Utara, pencemaran Teluk Buyat, dan asap dari pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Hal-hal tersebut adalah contoh-contoh masalah lingkungan yang memerlukan pemikiran dan tindak lanjut yang lebih nyata. Celakanya, sebagian orang penting masih menganggap persoalan lingkungan sebagai persoalan marjinal sehingga dijadikan prioritas kesekian untuk mengatasinya.

Perbaikan pengelolaan dan penataan lingkungan bukan tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan sumber daya yang dimilikinya, pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengurangi permasalahan sampah akibat pelaksanaan *sanitary landfill* yang tidak dilakukan dengan benar sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitarnya, pemerintah telah menjajaki untuk memproduksi biogas, dan mendatangkan *incinerator* canggih. Untuk mengatasi masalah sampah DKI, DPRD DKI merekomendasikan anggaran sebesar Rp 13 miliar untuk pembangunan infrastruktur Unit Pengelolaan Sampah (UPS), teknologi canggih dengan pelaksana PT Bio Fertilizer Indonesia (BFI). Kawasan Bopuncur dan Bandung Utara dicoba diselesaikan dengan pengendalian perijinan. Pemerintah pun mencoba melibatkan masyarakat dalam

menyelesaikan permasalahan ini, misalnya seperti dilakukan pemerintah kota Bandung di bantaran sungai Citarum. Sampai saat ini, upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah belum dapat memecahkan permasalahan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Dari sisi masyarakat, kekurangpengetahuan dan kekurangpedulian akan keberlangsungan lingkungan menjadikan mereka berbuat seenaknya, misalnya dengan membuang sampah sembarangan. Masyarakat tidak berpikir akan kemana, akan diapakan, dan apa dampak dari sampah yang dibuang terhadap lingkungan. Dari sisi pemerintah, penegakan peraturan yang sudah dibuat sangat sulit dilakukan. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa sangat sulit untuk membuktikan siapa pihak pencemar dan apabila terbukti pun pihak pencemar sangat sulit diajukan ke meja hijau. Program-program yang menunjang keberlanjutan lingkungan sangat minim dilakukan, karena bukan prioritas. Sedangkan dari sisi *Privat sector*, pengusaha sering terjebak untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan dampak usaha mereka terhadap lingkungan.

Tulisan ini akan membahas mengenai pengelolaan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Dampak pembangunan terhadap lingkungan dapat berupa pencemaran daratan, udara, atau air. Pencemaran daratan diakibatkan oleh sampah padat maupun cair. Jumlah dan jenis sampah padat (*solid waste*) saat ini sudah sampai pada tahap kritis, dimana pemerintah sudah tidak mampu untuk mengelolanya dengan baik, sehingga membahayakan lingkungan dan masyarakat.

## **B. Pembangunan, Dampak, dan Pengelolaan Dampak Pembangunan terhadap Lingkungan**

### **1. Pembangunan dan Dampaknya terhadap Lingkungan**

Pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu upaya yang dilakukan manusia untuk mengelola pembangunan, sehingga dampak yang ditimbulkannya tidak mengurangi daya dukung lingkungan. Pembangunan dilakukan agar mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan karena pembangunan dan kemajuan teknologi ternyata bukan hanya berdampak positif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya manusia menikmati berbagai kemudahan dalam menjalani hidup dengan adanya alat transportasi, tersedianya peralatan dan kebutuhan pangan dengan dukungan teknologi. Ternyata disamping manfaat, teknologi berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Alat transportasi menimbulkan pencemaran udara, sedangkan pencemaran daratan ditimbulkan oleh sampah padat atau pun cair, buangan dari berbagai aktivitas manusia. Untuk itu upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Salim (1993) mengemukakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan perlu memperhatikan tiga hal:

- a. Menggunakan sumber alam secara bijaksana agar bisa terpakai secara terus menerus untuk pembangunan berkesinambungan.
- b. Pemilihan teknologi pengolahan sumber alam yang tepat dan sekaligus mengendalikan pencemaran serta limbah akibat pembangunan.
- c. Menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi konsumsi masyarakat yang dikendalikan dalam batas kewajaran dan serasi dengan sumber alam yang tersedia, sehingga mencegah terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber alam untuk memenuhi konsumsi.

Pembangunan yang tidak memperhatikan hal-hal diatas berpotensi untuk menimbulkan pencemaran, misalnya pencemaran air, udara, maupun daratan. Pencemaran disebabkan oleh masuknya bahan organik maupun non organik ke dalam air, udara dan daratan yang menyebabkan turunnya daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Seharusnya lingkungan memberikan daya dukung yang optimal bagi kehidupan manusia. Kalau terjadi pencemaran, maka tujuan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia tidak tercapai.

Pencemaran daratan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal (Wardhana, 1995). Faktor internal disebabkan oleh peristiwa alam, seperti letusan gunung berapi yang memuntahkan debu, batu, dan bahan vulkanik lain yang menutupi dan merusak daratan. Hal ini tidak terlalu merisaukan karena dianggap sebagai bencana alam. Yang perlu diperhatikan adalah sumber pecemar yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh manusia.

Komponen pencemar daratan terdiri dari limbah organik yang berasal dari semua organisme alam termasuk manusia, dan limbah anorganik yang dihasilkan manusia. Bentuk dan macam limbah yang dihasilkan manusia tergantung dari tingkat peradaban manusia. Sebelum manusia mengenal kemajuan industri dan teknologi, limbah atau bahan buangan yang dihasilkan umumnya bersifat organik. Ditinjau dari kepentingan lingkungan, limbah organik ini sangat menguntungkan karena mudah diuraikan oleh mikroorganisme menjadi bahan yang menyatu kembali dengan alam tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah organik dan anorganik yang dihasilkan ini merupakan bahan buangan manusia yang selanjutnya disebut sebagai sampah padat (*solid waste*)

Pada kenyataannya, dari komposisi sampah yang dihasilkan, di kota Jakarta dan Bandung, sampah organik memberikan kontribusi yang cukup tinggi sekitar 70%. Di kota Bandung, sampah yang dihasilkan tiap hari mencapai 5.848 m<sup>3</sup>/hari di tahun 1985, meningkat menjadi 6.852 m<sup>3</sup>/hari di tahun 1992. Menurut Dinas Kebersihan Kota Bandung, volume sampah meningkat pada hari libur menjadi lebih dari 7000 m<sup>3</sup>/hari. Sebagian besar sampah (hampir 4000 m<sup>3</sup>/hari) berasal dari pemukiman, dengan komposisi sampah organik terbesar (73.25%) sedangkan jenis yang lain relatif kecil. Hanya 70% dari sampah yang dihasilkan ini dapat dikelola (dalam arti diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir, TPA) oleh pemerintah, sedangkan sisanya ada yang dibakar, di daur ulang, tertinggal di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), atau dibuang ke sungai.

## **2. Manajemen Pengelolaan Sampah Sebagai Bagian dari Pengelolaan Dampak Pembangunan terhadap Lingkungan**

Jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan pada masa lalu dan masa sekarang jauh berbeda. Pada masa lalu, masyarakat lebih banyak tergantung pada apa yang tersedia di alam tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Dengan demikian, sampah yang dihasilkan lebih banyak sampah organik, yang mudah didegradasi alam. Demikian halnya dengan jumlah, karena populasi manusia yang masih sedikit, jumlahnya pun sedikit, sehingga alam lebih mudah menguraikannya tanpa memerlukan pengelolaan yang rumit. Dengan berubahnya jumlah dan jenis sampah akibat berubahnya sistem sosial dalam kaitannya dengan pola konsumsi, teknologi, dan populasi masyarakat, maka pengelolaan sampah pun menjadi lebih sulit, sehingga memerlukan manajemen pengelolaan yang lebih canggih. Hal ini didorong pula oleh pola hidup mewah yang dilakukan sebagian masyarakat. Sumarwoto (1994), mengatakan bahwa pola hidup mewah dan konsumtif merupakan bahaya terhadap terdukungnya pembangunan secara berlanjut. Pola hidup

demikian mempunyai efek penyusutan sumber daya yang besar dan mendorong terjadinya keresahan sosial. Pola hidup mewah menganggap seolah-olah sumber daya tidak terbatas adanya.

Seperti disinggung oleh Tchobanoglous, et.al (1993) bahwa jumlah sampah yang dihasilkan tergantung dari pola konsumsi masyarakatnya serta teknologi yang membuatnya. Pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan dan kemajuan teknologi merupakan bagian dari sistem sosial. Sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat bisa berubah. Seperti dikatakan oleh Johnson (1996) bahwa perubahan sosial merujuk pada perubahan tata sosial dan ekologi (*social changes refers to the ways in which social and ecological arrangement change*) serta didorong oleh pertumbuhan populasi yang cepat dan perubahan karakteristik dari populasi itu sendiri. Dengan demikian perilaku masyarakat dalam menghasilkan sampah dan bagaimana mengelola sampah tersebut ditentukan oleh pola konsumsi, teknologi, dan populasi masyarakat.

Pengelolaan sampah sangat diperlukan berkaitan dengan makin meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan seiring dengan meningkatnya peradaban dan populasi manusia. Sementara itu, manusia memerlukan lahan untuk keperluan hidupnya, baik untuk perumahan dan aktifitas lainnya, sehingga lahan yang biasanya digunakan untuk penimbunan sampah (*land filling*, cara pembuangan sampah yang paling banyak digunakan) semakin terbatas. Dengan demikian diperlukan pengelolaan sampah yang dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh jumlah dan jenis sampah yang semakin banyak tersebut.

Manajemen pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan upaya mengelola sampah sehingga sampah yang dihasilkan dari berbagai aktifitas masyarakat tidak memberikan dampak yang buruk baik bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi lingkungannya. Tchobanoglous, et.al (1993) mendefinisikan manajemen pengelolaan sampah (*solid waste management*) sebagai berikut:

*Solid waste management may be define as the discipline associated with the control of generation, storage, collection, transfer and transport, processing, and disposal of solid wastes in a manner that it is in accord with the best principles of public health, economics, engineering, conservation, aesthetics and other environmental consideration, and that is also responsive to public attitudes.*

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah meliputi pengendalian terhadap (1) produksi sampah, (2) penanganan, pemisahan, penyimpanan dan pemrosesan sampah pada sumbernya, (3) pengumpulan sampah, (4) pemisahan dan pemrosesan serta transformasi sampah, (5) pengangkutan dan (6) pembuangan akhir. Pengelolaan ini juga harus memperhatikan kepentingan kesehatan masyarakat, diperhitungkan dari ekonomi, teknik, konservasi, keindahan, dan pertimbangan lingkungan yang lain, serta responsive terhadap perilaku masyarakat. Dengan demikian, terlihat bahwa pengelolaan sampah bersifat holistik dan akan melibatkan berbagai disiplin ilmu.

Selanjutnya Tchobanoglous, et.al (1993) mengemukakan hirarki dalam manajemen pengelolaan sampah terpadu (*Integrated Solid Waste Management*) sebagai berikut:

- a. Pengurangan sumber sampah (*source reduction*);
- b. Pendaaurulangan (*recycling*)
- c. Transformasi sampah (*waste transformation*)
- d. Penimbunan (*Landfilling*)

Yang dimaksud dengan pengurangan sumber sampah adalah pengurangan jumlah dan kadar racun dari sampah yang dihasilkan, atau sering dikatakan sebagai langkah pencegahan. Hal ini berarti pula mengurangi konsumsi dan bahan yang dibuang. Ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi jumlah sampah dan biaya yang diperlukan untuk penanganan sampah serta untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal-hal yang bisa dilakukan misalnya melalui perancangan barang, proses pembuatan, pengepakan, meminimalan racun, meminimalan volume material, serta memperpanjang masa kegunaan barang. Pendaaurulangan sampah dilakukan melalui tahapan: (a) pengumpulan dan pemisahan sampah, (b) penyiapan sampah untuk digunakan kembali (*reuse*), untuk diproses kembali (*reprocessing*), dan untuk digunakan oleh pabrik kembali (*remanufacture*), (c) penggunaan kembali (*reuse*), pemrosesan kembali (*reprocessing*), dan penggunaan oleh pabrik kembali (*remanufacture*).

Saat ini masyarakat umumnya tidak melakukan pengelolaan sampah. Masyarakat hanya membuang sampah yang kemudian diangkut dan dikumpulkan di TPS. Pihak pemerintah kemudian mengangkut sampah dari TPS untuk ditimbun di TPA dengan menggunakan mobil, tanpa dilakukan pemilahan dan pendaaurulangan. Aktifitas pemilahan dan pendaaurulangan sampah dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung, dengan melakukan pemulungan terhadap sampah tertentu seperti botol, plastik atau kertas. Barang-barang tersebut mereka kumpulkan dan dijual untuk di daur ulang.

Dengan melihat komposisi sampah serta permasalahannya yang tak kunjung selesai, perlu dicari suatu solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Untuk memecahkan masalah ini, perlu keterlibatan pihak masyarakat, pemerintah dan pengusaha secara simultan. Masyarakat sebagai pemberi kontribusi terbesar sampah padat sebenarnya mempunyai potensi untuk bersama-sama mengelola sampah pada sumbernya.

### **C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah**

Peran serta masyarakat menempati posisi yang sangat strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Seperti dikemukakan oleh Osborn (1992) dalam bukunya, *Reinventing Government*, bahwa untuk keberhasilan pembangunan, diantaranya adalah dengan mengurangi dominasi peran pemerintah dalam mengelola pembangunan (*Catalitic Government; steering rather than rowing*); serta meningkatkan peran serta masyarakat dengan konsep pemberdayaan (*Community-owned Government; empowerment rather than serving*). Dengan pemberdayaan, akan mendorong rasa kepemilikan pembangunan dari birokrasi ke masyarakat sehingga tujuan pembangunan akan lebih efektif karena masyarakat lebih peduli terhadap apa yang mereka perlukan. Salah satu bentuk pemberdayaan ini adalah adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat menunjukkan peran serta dan kontribusi yang diberikan masyarakat dalam proses pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Beberapa ahli telah mengemukakan pengertian partisipasi yang menggambarkan proses partisipasi dan hal tersebut tergantung dari perspektif lembaga yang menangani pembangunannya. Salah satu pengertiannya adalah bahwa partisipasi dikatakan sebagai suatu proses dimana pihak-pihak terkait (*stakeholders*) mempengaruhi dan berperan dalam mengendalikan inisiatif dan keputusan serta sumber daya pembangunan (*World Bank, 1994*). Menurut United Nation Development Program (UNDP, 1997), partisipasi dapat diinterpretasikan dalam dua pengertian besar, dalam

kaitannya dengan tujuan dan pendekatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi sebagai sebuah alat (*participation as a mean*) dan partisipasi sebagai sebuah akhir (*participation as an end*). Dalam pengertian pertama partisipasi dilihat sebagai suatu proses dimana masyarakat lokal bekerja sama dan berkolaborasi dengan program/proyek yang berasal dari luar. Dalam pengertian ke dua, partisipasi dilihat sebagai tujuan. Tujuan ini dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan masyarakat dalam arti melibatkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat untuk meningkatkan tanggung jawab untuk pembangunan mereka.

Dalam kaitan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, Borrini dan Shatty (dalam Pranarka dan Moeljarto, 1996), menyatakan bahwa dalam perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan penurunan kualitas sumber daya alam akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Dalam hal ini peran aktif masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat memproduksi sampah yang memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan, volumenya semakin meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk. Disini, peran rumah tangga sebagai kelompok terkecil dari masyarakat memegang peranan penting. Seperti dikatakan oleh Pranarka dan Moeljarto (1996), bahwa dalam pengkajian pemberdayaan, sebagian besar literatur mengakui pentingnya rumah tangga sebagai sumber utama pemberdayaan. Dalam melakukan pemberdayaan, Herrick (1995)<sup>1</sup> mengatakan bahwa pemberdayaan bisa dengan cara membentuk struktur/lembaga baru berupa unit pendidikan (*educational learning units*) dan proyek percontohan (*demonstration practice projects*).

Menurut Bab 21 Agenda 21, pengelolaan sampah seharusnya berwawasan lingkungan untuk mencegah dampak yang ditimbulkan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah merubah pola produksi dan konsumsi yang tidak seimbang. Hal ini secara tidak langsung memerlukan sebuah konsep manajemen siklus hidup terpadu. Jadi kerangka tindakan seharusnya ditentukan berdasarkan hirarki dari tujuan, dan terfokus pada empat program yang terkait dengan sampah, yaitu:

- a. mengurangi jumlah sampah (*minimizing waste*)
- b. meningkatkan penggunaan kembali sampah dan daur ulang yang berwawasan lingkungan
- c. mempromosikan TPA dan tempat pengolahan yang berwawasan lingkungan
- d. memperluas jangkauan pelayanan sampah

Untuk keberhasilan ke empat program tersebut di atas terlihat bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam mengurangi jumlah sampah (*reduce*) dan meningkatkan penggunaan kembali sampah (*reuse* dan *recycle*), sedangkan pemerintah dan swasta dapat berperan aktif dalam mempromosikan TPA dan tempat pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan. Lebih jauh lagi, pemerintah dapat memperluas jangkauan pelayanan sampah sehingga seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat dapat dikelola kembali.

Selain peran serta masyarakat, dukungan pemerintah dalam pengelolaan sampah kota ini sangat penting. Menurut Agenda 21, pemerintah sudah seharusnya meningkatkan program minimisasi sampah dengan meningkatkan pemberian informasi, pengetahuan bagaimana melakukan upaya minimisasi sampah tersebut, serta

---

<sup>1</sup> Herrick, J. 1995. Empowerment Practice and Social Change: The Place for New Social Movement Theory. A Working Draft preparing for The New Social Movement and Community Organizational Conference, Univ. of Washington. Seattle.

percontohan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara di tahun 2001, menunjukkan bahwa kinerja layanan kebersihan yang diberikan pemerintah masih rendah. Rendahnya kinerja kebersihan kawasan perkotaan diantaranya disebabkan oleh model kelembagaan yang masih kaku dan terpaku pada kelembagaan dinas. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa struktur kelembagaan organisasi pengelola kebersihan cenderung *highly centralized*, dan kurangnya dukungan sumber daya organisasi yang lain seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya memadainya dana, serta sarana dan prasarana. Swasta sendiri kurang berminat untuk terjun ke dalam usaha layanan ini karena layanan ini lebih bersifat barang publik. Penelitian tersebut menyarankan bahwa peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat diperlukan untuk sebagian katagori layanan substantif langsung, misalnya pemilahan dan pengumpulan sampah; sebagian katagori layanan substantif tak langsung, seperti pendaurulangan sampah; dan sebagian layanan fasilitatif, seperti pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan terjadi bila masyarakat turut serta dalam suatu proses pembangunan, berperan dengan memberi sumbangan baik materi maupun non materi untuk keberhasilannya. Seperti dikatakan Wasistiono (2003)<sup>2</sup> bahwa prinsip partisipasi masyarakat adalah sukarela, keterlibatan emosi, dan manfaat. Partisipasi ini hanya akan terjadi bila masyarakat melakukannya secara sukarela, tanpa paksaan pihak manapun. Sukarela ini pun hanya akan terjadi bila masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan serta dilibatkan dalam prosesnya sehingga mereka secara emosional terlibat dan merasa memiliki. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari upaya pemberdayaan, yang intinya membangun kemandirian masyarakat. Selanjutnya, Wasistiono mengutip Berger dan Neuhaus (1977), mengemukakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, diperlukan struktur perantara (*mediating structure*), yakni institusi yang berdiri diantara individu dengan kehidupan pribadinya dengan institusi besar dalam kehidupan publik. Struktur perantara tersebut dapat berupa: ketetanggaaan, keluarga, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap masyarakat di sebuah kecamatan di kota Bandung, diketahui bahwa:

1. Masyarakat merasa mempunyai tingkat pengetahuan dan kepedulian yang cukup terhadap pengelolaan sampah rumah tangga, tetapi di sisi lain masyarakat merasa bahwa fasilitas dan informasi yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan sampah masih sangat kurang, demikian halnya dengan dukungan dari pihak swasta dirasakan masyarakat masih kurang.
2. Semakin tinggi tingkat pendidikan umumnya diikuti oleh peningkatan penghasilan yang biasanya diikuti pula oleh perubahan pola konsumsinya. Tetapi hal ini tidak ada kaitannya dengan tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, yang berarti bahwa baik masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun tinggi bisa mempunyai pengetahuan dan perilaku yang tidak berbeda dalam menangani sampah rumah tangga.
3. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga baru sebatas himbauan dan ajakan untuk menjaga kebersihan rumah dan

---

<sup>2</sup> Wasistiono, Sadu. 2003. *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Konsep Kebijakan dan Arah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang Keberhasilan Otonomi Daerah*, disampaikan pada Diskusi Terbatas tentang "Desentralisasi, Pembangunan Daerah dan Penguatan Masyarakat Sipil" yang diselenggarakan oleh PKDA I LAN Bandung, 15 Oktober 2003

lingkungan serta beberapa program yang tidak dilakukan secara berkesinambungan serta tidak ada *law enforcement* bagi masyarakat untuk melakukannya.

Dengan melihat kesimpulan di atas tersebut di atas, peran *mediating structure* menjadi sangat perlu untuk ditingkatkan. *Mediating structure* yang dapat berperan dalam meningkatkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelompok PKK, atau pun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

#### **D. Penutup**

Dalam pembangunan, masyarakat adalah subyek dan obyek pembangunan. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, masyarakat sendiri yang harus mengelola pembangunan tersebut agar pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Permasalahan lingkungan muncul disebabkan kecerobohan manusia sendiri. Pencemaran darat, salah satunya muncul akibat tumpukan sampah padat yang tidak dikelola dengan seharusnya. Selama ini perhatian tertumpu kepada pemerintah yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini. Pada kenyataannya, permasalahan tak kunjung selesai. Padahal masyarakat, sebagai salah satu sumber penghasil sampah, mempunyai potensi untuk dilibatkan dalam menyelesaikan masalah ini, tentu dengan dukungan pemerintah dan pengusaha. Masyarakat dapat ditingkatkan partisipasinya dalam pengelolaan sampah yang mereka hasilkan dengan cara memperkuat peran *mediating structure* yang dekat dengan mereka. Upaya ini harus dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan, sehingga pola berpikir masyarakat bisa berubah sedikit demi sedikit.

## Bahan Bacaan

### Buku

- Johnson, A.G. 1996. *Human Arrangements; An Introduction to Sociology*. 4<sup>th</sup> ed. Times Mirror Higher Ed. Group, Inc.
- LaGrega, et.al. 1994. *Hazardous Waste Management*. Mc McGraw-Hill. Singapore.
- Pranarka dan Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment) dalam Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi (Priyono dan Pranarka, penyunting)*. CSIS. Jakarta.
- Salim, Emil. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Soemarwoto, Otto. 1994. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan. Jakarta.
- Tchobanoglous, et.al. 1993. *Integrated Solid Waste Management, Engineering Principles and Management Issues*. McGraw-Hill. New York.
- Wardhana, W. A. 1995. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Andi Offset. Yogyakarta.

### Artikel

- Ananta, Shafik. 2001. *Manajemen Sampah yang Berkelanjutan (Sustainable) di Bandar Lampung, Indonesia*.  
<http://www.cities.canberra.edu.au/publications/policypaper/shafik-indo.htm>
- Empowering People: A Guide Book to Participation*. 1997  
<http://www.undp.organisasi/csopp/pnguide0.htm>
- Reduce, Reuse, and Recycle*.  
<http://www.epa.gov/epaoswer/non-hw/muncpl/reduce.htm>
- PPPVT/VEDC, 1999. *Sampah dan Pengelolaannya*. Malang  
[http://www.vocetech.organisasi.bn/virtual\\_lib/swisscontact/sampah/sampah.htm](http://www.vocetech.organisasi.bn/virtual_lib/swisscontact/sampah/sampah.htm)

### Dokumen

- Agenda 21 Chapter 21. *Environmentally Sound Management of Solid Wastes and Sewage-related Issues*  
<http://www.unep.organisasi/Documents/default.asp?DocumentID=52&articleID=69>
- Sufianti, Ely. 2003. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung (Studi Kasus di Kecamatan Margacinta Kota Bandung)*. Penelitian mandiri. STIA LAN Bandung.
- Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, 2001. *Kajian: Peningkatan Pelayanan Kebersihan di Kawasan Perkotaan*